

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dalam bidang Teknologi Informasi (TI) dan ranah digital telah memberikan dampak signifikan seperti pertumbuhan ekonomi yang telah mengadopsi keterampilan digital, menciptakan peluang bisnis baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini memacu perusahaan yang telah mapan untuk mempercepat proses Transformasi Digital (TD). Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara bisnis tradisional dalam mengelola operasi mereka dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan kepada pelanggan melalui penggunaan teknologi dan internet secara luas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan perusahaan dalam mengimplementasikan TD (Khaerunnisa dkk., 2023).

Dengan memanfaatkan TI, bisnis dapat memperbaiki kualitas informasi dan layanan yang mereka sediakan, pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional (Bahtiar dkk., 2020). Pada awalnya, TI diadopsi sebagai alat bantu dalam kegiatan operasional bisnis, tetapi dengan kemajuan teknologi yang terus bergerak cepat, kesadaran tentang pentingnya teknologi telah meluas di kalangan masyarakat. Akibatnya, pelaku bisnis semakin mengakui peran krusial teknologi dalam memajukan kepuasan pelanggan (Aditya dkk., 2019).

Dengan melihat fenomena kebutuhan akan TD terus meningkat, sebagian didorong oleh kebijakan regulator dan sebagian lagi oleh perubahan global yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Perubahan besar ini dapat dicapai dengan mengadopsi teknologi digital yang inovatif dan dengan penerapan strategis sumber daya serta kapabilitas inti. Tujuan utama dari transformasi ini adalah untuk menciptakan perubahan yang mendasar pada entitas seperti organisasi, jaringan bisnis, industri, atau korporasi. Selain itu, transformasi ini juga bertujuan untuk mengartikulasikan kembali nilai yang ditawarkan oleh entitas kepada *stakeholder*-nya (Mulyana dkk., 2023).

Untuk mencapai keberhasilan dalam TD, perusahaan harus mengembangkan kapabilitas TI yang baru dan yang sejalan dengan prioritas strategis di ranah

digital. Ini mencakup 4 (empat) elemen kunci: teknologi, tata kelola, proses, dan talenta. Untuk mempertahankan eksistensi di era TD, perusahaan harus memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang memadai untuk menangkap peluang bisnis yang muncul, yang diidentifikasi dan diprioritaskan melalui perangkat digital (Mulyana dkk., 2021).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun UMKM telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Sehubungan dengan itu, UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan pembinaan UMKM (NKRI, 2008).

UMKM yang telah dideskripsikan bersangkutan dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (OJK, 2024).

Berdasarkan (NKRI, 1998) tentang Perbankan, struktur perbankan Indonesia terdiri atas 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (NKRI, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa kategori Bank Umum dan BPR berbeda dari

beberapa faktor. Berdasarkan bentuk badan hukum, Bank Umum berbentuk badan hukum perseroan terbatas, sedangkan BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Dari modal, Bank Umum paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), melainkan BPR paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) (NKRI, 2023). Selain itu, BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah terbatas yang terletak di dalam wilayah tersebut. Fokus BPR terletak pada melayani sektor pasar yang berbeda, termasuk daerah pedesaan terpencil atau wilayah metropolitan yang tidak dilayani secara memadai oleh lembaga keuangan besar serta UMKM. Setiap pendirian yang menawarkan layanan keuangan kepada usaha mikro, seperti unit perbankan mikro nasional, BPR, dan BPRS, diklasifikasikan sebagai entitas keuangan mikro formal yang beroperasi sesuai dengan undang-undang peraturan perbankan (BRIN & BKF, 2022). Oleh karena itu, BPR dapat dianggap sebagai UMKM dalam ranah perbankan karena operasinya dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank Umum.

BPRCCo merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen kecil dan menengah secara konvensional, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRCCo perlu melakukan pengukuran untuk mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menerapkan penyusunan TKTI untuk TD.

TD pada BPR membawa banyak peluang, namun juga menghadirkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Adapun masalah yang pada umumnya dihadapi oleh BPR, bersangkutan dengan infrastruktur teknologi yang berhubungan dengan biaya implementasi untuk menerapkan adanya teknologi baru untuk mengadopsi TD dapat menjadi beban bagi BPR yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, terdapat beberapa masalah lain terkait risiko keamanan siber, kepatuhan dan regulasi, serta kepercayaan nasabah yang selanjutnya harus dihadapi segera oleh BPR untuk menghadapi kompetitor.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi mekanisme Tata Kelola Manajemen dan Teknologi Informasi (TKMTI) yang mempengaruhi TD (Mulyana dkk., 2021) dan telah memvalidasi pengaruh mekanisme TKMTI terhadap TD. Penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme TKMTI hibrida yang mempengaruhi TD di industri perbankan dan asuransi di Indonesia (Mulyana dkk., 2022). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pengaruh mekanisme TKMTI hibrida terhadap TD dan kinerja organisasi di industri perbankan. Khususnya, penelitian lebih mendalam diperlukan dalam konteks BPRCCo untuk mengidentifikasi tata kelola yang efektif yang dapat mendukung perjalanan TD, yang menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Mekanisme TKTI baru yang memengaruhi TD telah teridentifikasi. Rangkaian mekanisme yang diperluas ini mencakup mekanisme yang *agile*-adaptif dan tradisional, termasuk persepsi efektivitas dan kemudahan penerapan mekanisme tersebut (Mulyana dkk., 2022). Selanjutnya penelitian (Mulyana dkk., 2023), mengukur tingkat pengaruh kedua jenis mekanisme tersebut, sehingga menghasilkan pengaruh moderat dari kedua jenis mekanisme tersebut terhadap TD dan pengaruh kuat TD terhadap kinerja organisasi. (Mulyana dkk., 2024b) telah menyelidiki mekanisme utama TKTI *ambidextrous* yang memengaruhi keberhasilan TD di sebuah bank di Indonesia yang telah diakui menerima banyak penghargaan dalam perjalanannya, termasuk dampak TD dan kinerja organisasi. Menurut (Mulyana dkk., 2024b), TKTI yang *ambidextrous* mengacu pada, "kombinasi sinergis antara mekanisme TKTI yang *agile*-adaptif dan tradisional yang menyeimbangkan dinamika eksplorasi dengan fleksibilitas inovasi, kemampuan beradaptasi, dan eksploitasi dengan stabilitas kontrol efisiensi yang memungkinkan organisasi mengoptimalkan risiko dan sumber daya digital dan TI mereka menuju realisasi nilai". Mekanisme TKTI yang penting untuk keberhasilan TD dan pencapaian kinerja organisasi disebut sebagai "kunci" karena keduanya membentuk dasar model *ambidextrous*, yang memungkinkan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang berkembang pesat dengan menjaga stabilitas dan kendali.

Penelitian sebelumnya pada konteks perbankan yang telah menggunakan berbagai pendekatan COBIT 2019 dengan fokus kepada layanan TI (Tarbiyatuzzahrah

dkk., 2023), *devops* (Riznawati dkk., 2023), risiko TI (Dwi dkk., 2023), keamanan informasi (Rahmadana dkk., 2023). Namun belum ada yang menggunakan SME *Focus Area*, dengan itu penelitian ini dibuat untuk menganalisis COBIT 2019 SME *Focus Area* pada sektor perbankan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana susunan rekomendasi solusi TKTI berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup *design factor* prioritas COBIT 2019 area fokus SME untuk TD UMKM?
- b. Bagaimana rancangan TKTI berdasarkan tujuh komponen COBIT 2019 pada area fokus SME untuk TD UMKM?
- c. Bagaimana estimasi peningkatan kapabilitas TKTI berdasarkan COBIT 2019 area fokus SME dapat berpengaruh terhadap TD UMKM?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu:

- a. Menyusun rekomendasi solusi TKTI berdasarkan hasil analisis kesenjangan penilaian pada lingkup *design factor* prioritas COBIT 2019 area fokus SME untuk TD UMKM.
- b. Membuat rancangan TKTI berdasarkan tujuh komponen COBIT 2019 pada area fokus SME untuk TD UMKM.
- c. Mengetahui estimasi peningkatan kapabilitas TKTI berdasarkan COBIT 2019 area fokus SME dapat berpengaruh terhadap TD UMKM.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dari proposal tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada perusahaan BPRCCo yang bergerak di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai fungsinya yaitu melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- b. Penggunaan kerangka kerja COBIT 2019 area fokus SME digunakan

untuk penelitian dalam penyusunan TKTI untuk TD pada Perusahaan BPRCCo.

- c. Penggunaan *design toolkit* COBIT 2019 melalui analisis faktor desain 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) sebagai penilaian untuk mencapai prioritas tujuan TKMTI.
- d. *Assessment* terhadap 3 tujuan TKMTI yang nantinya sebagai batasan penilaian pada kondisi saat ini BPRCCo untuk mencapai target tingkat kapabilitas.

I.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan basis pengetahuan penelitian dalam menggunakan *framework* COBIT 2019 area fokus SME untuk TD UMKM.
- b. Pemanfaatan implikasi praktis hasil penelitian TKTI untuk TD UMKM di BPRCCo serta organisasi sejenis lainnya.